



Stara Asrita

Prodi Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

Life begins at Thirty

sudah tercapai, hingga rencana apa yang harus dirubah dalam hidup karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan. Terkadang usia justru menjadi halangan bagi kita untuk terus berkarya, apalagi untuk perempuan yang semakin terbatas pergerakannya.

Bagi yang lahir pada tahun 1991, tahun ini mereka memasuki usia 30 tahun. John Travolta pernah mengatakan "Your life starts to take shape at 30. You don't have to make excuses for who you are anymore". Artinya pada umur ini kita telah memiliki konsep diri sehingga tidak perlu mengikuti arus yang tidak

sesuai dengan keinginan pribadi. Tuntutan keluarga atau masyarakat terhadap seseorang justru membuat kita tidak menemukan jati diri. Desakan tersebut kerap terjadi pada perempuan.

Dalam pandangan masyarakat, secara tidak langsung perempuan yang berusia 30 tahun harus sudah menikah, punya anak, rumah, mobil, bisa memilih untuk menjadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir dan masih banyak lagi. Acap kali perempuan yang berada pada fase ini merasa tertekan. Padahal tidak semua perempuan mau dan mampu memilih jalan hidup sesuai

dengan tuntutan sosial tersebut. Namun di sisi lain, perempuan yang misalnya masih single, dianggap tidak laku, sok jual mahal bahkan dicurigai memiliki penyimpangan seksual.

Perempuan tidak perlu khawatir pada kondisi ini. Di masa sekarang, tidak sedikit perempuan mulai menyadari bahwa hidup mereka adalah keputusan mereka. Dilansir dari laman womantalk.com, usia 30 tahun dapat membuat kita lebih menikmati hidup. Pertama, kita lebih bisa mengontrol emosi dan tingkat kedewasaan juga akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Kedua, kita

dapat menentukan prioritas sesuai dengan keinginan dan rencana yang lebih matang.

Ketiga, hidup lebih teratur, kita bisa memilih apa yang baik dan tidak baik sesuai kemauan. Kita mampu menjalani hidup dengan aturan yang kita buat sendiri. Keempat, lebih percaya diri. Ketika kita memiliki kemampuan, jangan disembunyikan hanya karena takut menjadi perbincangan, tunjukkan saja. Kelima, lebih memperhatikan gaya hidup dan pola makan, untuk menjaga kesehatan. Keenam, yang terpenting adalah kita akan lebih mencintai diri sendiri.



Poin terakhir adalah poin yang seharusnya menjadi perhatian semua perempuan, terutama yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak perlu bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan, cintai semua yang ada pada diri kita. Lakukan apa yang kita sukai, perawat diri, bekerja, liburan, atau me time. Jadilah dirimu sendiri, karena kita hidup hanya sekali. Perempuan juga punya hak untuk mengaktualisasikan diri di ruang publik sesuai dengan passion yang dimiliki. (*)

UKSW Salatiga Tambah Guru Besar Ekonomi

SALATIGA (KR) - Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga menambah tiga guru besar di bidang ekonomi. Ketiganya adalah Prof Apriani Dorkas Rambu Atahau SE MCom PhD. (dalam bidang Ilmu Manajemen), Prof Dr Gatot Sasongko SE MS (dalam bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan) dan guru besar termuda Prof Dr Theresia Woro Damayanti SE MSi AK CA BKP (dalam bidang Ilmu Akuntansi). Pengukuhan tiga guru besar di FEB ini dilakukan daring dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak UKSW dan LLDIKTI VI karena masa pandemi Covid-19. Proses pengajuan guru besar ini memakan waktu satu tahun. Dengan diserahkannya SK guru besar tersebut, maka di FEB UKSW Salatiga, menjadi 9 profesor di bidang ekonomi. "Saya bersyukur mendapat anugerah sebagai guru besar. Saat ini di FEB UKSW Salatiga terdapat 9 guru besar. Sebelumnya 6 orang, saat ini bertambah 3 orang termasuk saya," jelas Theresia Woro Damayanti, Kamis (17/6).

SK diserahkan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Prof Dr Ir Muhammad Zainuri DEA kepada Rektor UKSW Neil Samuel Rupidara SE MSc PhD lalu diserahkan kepada ketiga guru besar di FEB tersebut. Jumlah guru besar di UKSW berada di seluruh fakultas, sebanyak 14 orang. "Sangat terasa konsistensi berupa dukungan yang semakin besar bagi UKSW, terima kasih atas kontribusi nyata bagi kualitas dan layanan pendidikan tinggi khususnya di wilayah VI," kata Neil Rupidara. Kepala LLDIKTI Wilayah VI Prof Muhammad Zainuri menyebut penambahan guru besar merupakan nilai yang strategis baik bagi guru besar itu sendiri maupun lembaganya. (Sus)



MIMBAR LEGISLATIF
DPRD KAB. WONOSOBO

WONOSOBO (KR) - Selama masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sempat mengalami kontraksi sebesar -1,66 persen. Meski demikian, data tersebut masih tergolong cukup positif karena masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jateng yang mencapai -2,65%, serta pertumbuhan ekonomi nasional -2,07%.

"Bisa dikatakan, selama pandemi Covid-19 semua sektor ekonomi di Wonosobo mengalami penurunan

WONOSOBO ALAMI KONTRAKSI -1,66 PERSEN Ekonomi Tumbuh di Atas Provinsi-Nasional

pertumbuhan ekonomi, kecuali sektor pertanian yang mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,83 persen, dibanding 2019 yang hanya 1,99 persen," papar Wakil Bupati (Wabup) Wonosobo Muhammad Albar saat menyampaikan 8 poin penting jawaban Bupati Wonosobo atas pandangan umum Fraksi di DPRD Wonosobo terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Wonosobo, Kamis (17/6).

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, Wabup juga menyampaikan jawaban terkait laju inflasi di Kabupaten Wonosobo selama masa pandemi Covid-19 yang dinilai cenderung menunjukkan dampak positif. Laju inflasi 2020 mengalami penurunan menjadi 1,90 persen dibanding laju inflasi 2019 yang mencapai 2,28 persen. Rendahnya tingkat inflasi ini ber-

dampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di daerah.

Sedangkan menanggapi pertanyaan sebagian Fraksi di DPRD Wonosobo terkait kebijakan 'Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19' dan pemulihan ekonomi yang dinilai tidak efektif, Wabup, menjelaskan bahwa penanganan dampak ekonomi telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, seperti Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas PUPR dengan total anggaran Rp 4,39 miliar dan dapat terealisasi Rp 3,83 miliar atau 87,27 persen yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak terduga.

Adapun bentuk kegiatannya, jelas Wabup, antara lain program pembelian masker dari UKM di daerah, pengadaan media-media sosialisasi

menyebut penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19, dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Termasuk kegiatan program padat karya infrastruktur Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA).

Terkait sejumlah Fraksi DPRD Wonosobo yang menyuarakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2020 sebesar Rp 154,45 miliar. Dijelaskan, bahwa besaran Silpa yang terbentuk

bukan semata-mata suatu keberhasilan efisiensi anggaran, tetapi terjadi karena perencanaan dan penganggaran yang kurang memadai, sehingga pencapaian target yang telah ditetapkan berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang kurang optimal. Untuk itu, ke depan Pemkab Wonosobo akan lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan APBD.

(Sekretariat DPRD/Art)



KR-Ariswanto

Wakil Bupati Wonosobo menyampaikan jawaban Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Wonosobo.

Pemkab Magelang Selamatkan Aset

MAGELANG (KR) - Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Tim Pengambilalihan Plaza Muntilan yang terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Bagian Hukum, BPPKAD Kabupaten Magelang serta Linmas melakukan tindakan penyelamatan aset Pemda dengan pengambilalihan Plaza Muntilan, Selasa (15/6). Untuk diketahui sebelumnya bahwa, terdapat kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT Merbabu untuk membangun Plaza Muntilan di bekas terminal lama Muntilan Nomor 974/335/11/1992 dimana Pemkab Magelang menyediakan tanah dan PT Merbabu membangun ruko. Namun demikian, perjanjian tersebut per 11 Februari 2012 telah berakhir. Sejak saat itu secara yuridis pengelolaan menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Magelang.

"Plaza Muntilan merupakan barang/aset milik daerah. Pada waktu yang lalu

ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan pihak ketiga, dimana perjanjian itu sudah selesai di tahun 2012. Sejak tahun 2012 itu kemudian ruko di Plaza Muntilan masih ditempati oleh para penempat baik itu eks pemegang HGB ataupun disewakan oleh eks pemegang HGB," jelas Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang, Siti Zumaroh saat memantau kegiatan pengamanan aset Plaza Muntilan. Sampai dengan saat ini beberapa para penempat masih menempati ruko, tetapi sebagian sudah ada perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Magelang (sesuai aturan). Namun demikian, beberapa penempat lainnya menggunakan ruko tanpa memberikan kontribusi kepada pemerintah. "Saat ini akan kita ambil alih sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyelamatan aset daerah. Di sini (Plaza Muntilan) keseluruhan ada 51 ruko/kios," jelas Siti Zumaroh. (Bag)

Jateng Valey, Simbol Survival di Tengah Pandemi

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menandatangani pembangunan Jateng Valey di kawasan Hutan Wisata Penggaron, Kabupaten Semarang, merupakan bentuk survival di tengah pandemi Covid-19. Ganjar Pranowo meminta kepada pembangun agar mengelola pembangunannya dengan berorientasi lingkungan. Ganjar Pranowo mengatakan hal itu usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Jateng Valey, Rabu (16/6).

"Ini merupakan bagian

dari survival kita. Di tengah pandemi Covid-19 ekonomi tetap coba kita gerakkan, potensi-potensi ekonomi kita gerakkan, ada potensi-potensi sosial kemasyarakatan yang bisa kita gabung, dan pembangunan Jateng Valley ini adalah salah satunya," ujarnya.

Ganjar Pranowo mengatakan, dengan peletakan batu pertama tersebut menandai bahwa di situasi pandemi Covid-19 suasananya tidak melalui haru biru. Namun juga jadi bukti seluruh pihak memiliki semangat untuk

bisa bangkit dengan segala cara dan kekuatan. Ganjar minta ke depan desain yang dibuat itu betul-betul akan bisa mendorong pariwisata yang ciamik, bagus, dan punya faktor pembeda dengan yang lain. Pengembang diminta untuk memprioritaskan bangunan-bangunan iconic, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang.

Ganjar Pranowo *me-wanti-wanti* agar pengelolaan Jateng Valey dilakukan dengan berorientasi lingkungan. Untuk itu Gubernur minta agar tidak terlalu banyak area dengan pohon-pohon yang sudah tinggi menjulang tersebut dipotong. "Pastikan sesedikit mungkin pohon yang dipotong, karena ini sudah menjadi hutan yang sangat bagus dan orang kalau datang ke sini harapannya dia akan mendapatkan oksigen segar, gratis, bahagia dan kemudian mendapatkan nilai tambah dari orang-orang yang datang ke sini," ujarnya. (Bdi)



KR-Budiono

Ganjar Pranowo melakukan peletakan batu pertama pembangunan Jateng Valey.

Dewan Ingatkan Setiap Hewan Kurban Wajib Disertai Surat Kesehatan



Meski di tengah pandemi, gairah masyarakat untuk berkorban di Hari Raya Idul Adha tinggi. Namun di tengah pandemi ini, ada sedikit pergeseran pola jual beli hewan kurban yakni secara online. Untuk itu, ada hal-hal yang harus diketahui oleh para calon pengkorban maupun penjual terkait hewan kurban yang diperjual belikan. Hal itu akan mempengaruhi syarat sah hewan kurban maupun kondisi kesehatannya.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly A Alkatiri dalam acara prime topic DPRD Jateng dengan tema "Jiwa Berkorban di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan di Solo, Jumat (18/6). Menurut Alkatiri, animo masyarakat untuk berkorban cukup tinggi. Apalagi di tengah pandemi ini, daging kurban yang dibagikan pada masyarakat bisa jadi akan begitu bernilai dan dibutuhkan.

Namun ia mengingatkan, bagi penjual maupun calon pengkorban, harus benar-benar tahu syarat hewan yang akan dikurbankan. Syarat-syarat sah hewan kurban itu sudah dijelaskan dalam syariat agama Islam. Mulai dari kondisi sehat, tidak cacat, umur sudah memenuhi ketentuan, hingga tidak boleh kurus.

Dari sisi kesehatan, Quatly menekankan harus ada Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). "Sesuai penjelasan dari dinas, itu wajib. Kenyataannya masih ada hewan kurban yang belum dilengkapi dengan SKKH. Maka, dinas terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota



KR-Budiono

Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly A Alkatiri (nomor 2 dari kanan) bersama anaraksumber lainnya dalam acara prime topic DPRD Jateng dengan tema "Jiwa Berkorban di Tengah Pandemi" yang diselenggarakan di Solo.

harus melakukan sosialisasi dan edukasi pada pedagang," kata Quatly A Alkatiri.

Hadir pada diskusi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Jateng, Lalu M Syafridi dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Syamsul Hidayat. Menurut politikus dari PKS ini, pihak pertama yang mesti diberikan edukasi dan sosialisasi adalah pedagang. Jika pedagang memiliki kesadaran untuk melengkapi semua persyaratan hewan kurban dengan SKKH maka pembeli akan merasa tenang dan nyaman dalam melakukan transaksi. Apalagi saat ini ada sistem jual beli online, pedagang wajib menunjukkan SKKH tersebut pada calon pembelinya.

Hal lain yang ia tekankan adalah saat proses penyembelihan hewan kurban di masa pandemi ini harus tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (Prokes). Lokasi penyembelihan yang diprioritaskan adalah di Rumah Potong Hewan (RPH). Namun jika RPH tidak bisa menampung semua hewan kurban, masyarakat bisa

melakukan penyembelihan secara mandiri dengan catatan prokes wajib diterapkan.

"Prokes itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Wajib! Tak hanya saat proses penyembelihan tapi juga saat pendistribusian daging. Jangan sampai malah terjadi kerumunan nantinya," tegas Quatly.

Kepala Disnakeswan Jateng, Lalu M Syafridi mengatakan, selain pedagang, calon pembeli harus berani menanyakan SKKH pada penyedia hewan kurban. Menurutnya, SKKH itu wajib ada dan dikeluarkan oleh dokter hewan dari wilayah asal hewan tersebut dibeli. Kewajiban SKKH ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan.

Untuk pengawasan dan sosialisasi telah dilakukan bersama dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota. Namun, karena banyaknya pedagang hewan kurban musiman maka bisa jadi ada yang belum tersentuh sosialisasi. Berdasarkan catatannya, pada kurban tahun 2020 di Jateng, ada 1.511

tempat penjualan hewan kurban. Jumlah itu termasuk pedagang hewan kurban musiman di pinggir-pinggir jalan.

Jumlah hewan kurban pada tahun lalu sebanyak 401.267 ekor. Terdiri dari 234.505 kambing, 92 ribu sapi, 70 ribu domba dan 2.800 kerbau. Lalu mengatakan hewan kurban dari Jateng mencukupi kebutuhan sehingga tak perlu mendatangkan dari luar provinsi.

Pihaknya juga menghimbau agar penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan. Hal ini untuk menghindari kerumunan dan daging lebih higienis. "Dalam pemeriksaan kesehatan hewan kurban juga dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Untuk memastikan kelayakan dan kesehatannya," tutur Lalu.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Syamsul Hidayat menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengan syarat sahnya hewan kurban. Termasuk hukum kurban adalah sunah muakad atau sangat ditekankan dalam syariat agama Islam. (Adv/Bdi)